

**PENGARUH PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN 109 TERHADAP IMPLEMENTASI
GOOD GOVERNANCE**
(Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis)

Dariana, Ruzita

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
dariana.bengkalis72@gmail.com, ruzita.zita@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how the application of Financial Accounting Standards Statement 109 and the implementation of Good Governance in the National Zakat Board of Bengkalis Regency and the influence of the application of the Financial Accounting Standard Statement 109 on the implementation of Good Governance in the national zakat board of Bengkalis Regency. This research was conducted using quantitative and descriptive methods. These data were obtained from questionnaire data, interviews and documentation that were distributed to all employees of the Bengkalis Regency National Amil Zakat Agency and several Zakat Collection Units in Bengkalis Regency. The analytical method used in this study is to use a simple linear regression. The results of this study indicate that the effect of the adoption of the Statement of Financial Accounting Standards 109 has a positive and significant effect on the implementation of Good Governance by 90.9%.

Keywords: PSAK 109, Good Governance, BAZNAS.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan implementasi *Good Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis serta pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 terhadap implementasi *Good Governance* pada badan amil zakat nasional Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Data-data ini diperoleh dari data kuesioner, wawancara dan dokumentasi yang dibagikan kepada seluruh karyawan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis dan beberapa Unit Pengumpulan Zakat yang ada di Kabupaten Bengkalis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi *Good Governance* sebesar 90.9%.

Kata Kunci: PSAK 109, *Good Governance*, BAZNAS.

PENDAHULUAN

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Ditinjau dari segi bahasa zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*), jika di ucapkan *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika di ucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkahi. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci). Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelolaan zakat (Rozalinda 2013, 15).

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional yang disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis yaitu Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (RI 2011, 3).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang memerlukan tingkat transparansi/akuntabilitas yang tinggi karena BAZNAS Kabupaten Bengkalis merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dimana tugas dari organisasi adalah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana berlebih dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dana. Untuk mewujudkan penerapan PSAK 109 terhadap *good governance* yang tinggi dari sebuah organisasi maka diperlukan intern yang cukup memandai untuk mengontrol jalannya organisasi tersebut. Hal tersebut sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim yaitu institusi zakat, infaq, sedekah (ZIS). Pengelola dalam hal ini adalah amil zakat, berperan penting dalam terselenggaranya distribusi dana yang tepat. Pengetahuan serta tingkat spiritualitas yang baik menjadi acuan dalam menjalankan amanah sesuai dengan standar yang berlaku dalam lembaga syariah.

Good corporate governance dimaknai bahwa sebuah tata kelola perusahaan yang baik menyangkut transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan *fairness*. Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan informasi, material dan relevan mengenai lembaga organisasi/perusahaan. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organisasi lembaga sehingga pengelolaan lembaga/organisasi berjalan dengan efektif. Responsibilitas lembaga/organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sosial sehingga terjaga kesinambungan lembaga. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana lembaga organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perilaku adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku (Kurniawan 2012, 12).

Tata kelola perusahaan yang baik merujuk pada dua hal, yakni pembagian dan pelaksanaan tugas. Pembagian tugas didasarkan pada kompetensi individu, pengalaman serta kemauan keras untuk mengembangkan diri serta kesiapan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan. Sementara, dari sisi pelaksanaan (operasional) tanggung jawab merupakan kriteria utama. Dari beberapa prinsip *Good Corporate Governance* yang digunakan berbagai institusi, terlihat bahwa prinsip yang melandasi sangat bervariasi dan disesuaikan dengan kondisi institusional. Akuntabilitas adalah memvisualisasikan ketaatan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan melakukan evaluasi kinerja, keterbukaan pembuatan keputusan, mengacu jadwal yang ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan efektifitas biaya pelaksanaan tugasnya (Sedarmayanti 2011, 410). Bentuk dari kejelasan struktur dan fungsi perusahaan harus dikelola secara benar sesuai dengan kepentingan *stakeholder*.

Dari fenomena tersebut tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan transparansi dan akuntabilitas yang baik termasuk didalamnya pencatatan fungsi akuntansi yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan juga peningkatan kepercayaan publik terhadap BAZNAS tersebut dapat diwujudkan dengan baik dengan adanya penerapan PSAK 109. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dan implementasi *Good Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 terhadap implementasi *Good Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

TELAAH LITERATUR

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)

Penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho 2003, 158). Penerapan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan (Solihin 2008, 65). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah suatu kerangka prosedur petunjuk untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan yang berkaitan dengan pencatatan, penyusunan, perlakuan, serta penyajian laporan keuangan (Finansialku 2019).

Akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi juga diartikan sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan atau organisasi dan hasil usaha pada waktu atau periode tertentu sebagai pertanggungjawaban manajemen serta untuk pengambilan keputusan. Akuntansi zakat merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, menyajikan data dan transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan digunakan sebagai pencatatan zakat, infak dan sedekah yang diterima

dari donatur yang akan disalurkan kepada mustahik dan pihak lainnya melalui lembaga zakat (Khaddafi 2016, 105).

Tujuan dari akuntansi ZIS menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Akuntansi ZIS dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membantu para amil yang menerima dan menyalurkan ZIS atau entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan ZIS (Rahman 2015).

Good Governance

Governance diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Pengertian *good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, kemudian menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Governance* (pemerintahan, tata pemerintah, tata kelola) adalah konsep kunci dalam membentuk hubungan antara negara dan masyarakat atau sebaliknya dalam konteks kehidupan modern. Istilah "*Governance*" diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1990-an dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan "teoretik" dan "empirik" dari istilah "*government*" (pemerintahan) yang intinya merujuk pada fungsi-fungsi politik dan "administrasi publik", yang kemudian bergeser menuju istilah-istilah yang bersifat moderatis, sesuai dengan pola atau tren perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih memperhatikan aspek kebermanfaatan atau kemaslahatan umum (Mardiasmo 2009, 17-18).

Prinsip *Good Governance* dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang demokratis, bersih, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, efektif dan efisien. Tekad untuk mewujudkan prinsip *Good Governance* juga didasari oleh fakta peran birokrasi pemerintah daerah yang belum optimal memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat (Neta 2012).

Berdasarkan teori yang dipaparkan maka dapat ditarik hipotesis penelitian yaitu: bahwa diduga penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 berpengaruh signifikan terhadap implementasi *Good Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis di jalan Kelapapati Darat Desa Kelapapati. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Sumber datanya berasal dari data primer berupa kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Kuesioner dibagikan kepada seluruh karyawan BAZNAS Kabupaten Bengkalis dan beberapa Unit Pengumpulan Zakat yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan

total 42 orang responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 sudah diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2017. Sehingga alat ukur dalam menyusun laporan keuangan yang disajikan adalah pengakuan dan pengukuran, dimana penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah yang diterima oleh *muzakki* diakui sebagai penambah ZIS serta dan ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Pengakuan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan PSAK 109, dimana dana zakat diakui ketika *muzzaki* menyatakan kesediaan membayar zakatnya dengan mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbang ke pelaksanaan bidang umum dan pengumpulan dengan periode waktu yang tidak di tentukan oleh pihak BAZNAS. Sedangkan pengukuran zakat, infaq/shadaqah yang dilakukan baznas Kabupaten Bengkalis sudah baik pelaksanaan karena BAZNAS tidak menerima aset non kas jadi pengukuran yang dilakukan menggunakan satuan uang dengan mengikuti harga pasar atau dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai diatur dalam PSAK yang relevan.

Penyajian dan pengungkapan, dimana penyajian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bengkalis yaitu menyajikan lima komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan PSAK No. 109 terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana Zakat, Laporan Perubahan Dana Infaq/Shadaqah, Laporan Perubahan Dana Amil, dan Laporan Arus Kas.

Implementasi *Good Governance*

BAZNAS memiliki tata kelola lembaga yang baik menyangkut transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, *fairness*, aturan hukum, *consensus orientation*, keadilan, visi strategi, efisien dan efektif. Dimana transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai lembaga BAZNAS. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organisasi lembaga sehingga pengelolaan pada BAZNAS berjalan dengan efektif. Responsibilitas BAZNAS harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sosial sehingga terjaga kesinambungan lembaga. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perilaku adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak semua pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Aturan hukum di BAZNAS sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Orientasi konsesus dimana BAZNAS melakukan pengambilan keputusan yang baik agar memperoleh pilihan terbaik dalam hal kebijakan. Keadilan suatu keadaan dimana lembaga organisasi dikelola secara professional dan tidak ada yang harus diperbedakan. Visi strategi, harus ada suatu perencanaan untuk mewujudkan organisasi yang baik dan berjalan dengan tujuan yang diperkirakan. Efisien dan efektif, BAZNAS sudah

menjalankan tugas-tugas sesuai dengan peraturan yang telah diberikan sehingga apa yang dtujukan sudah berjalan dengan baiknya.

Hasil Pengumpulan Data

Data yang diperoleh untuk penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai BAZNAS Kabupaten Bengkalis, dan beberapa Unit Pengumpulan Zakat di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	23	54,76%
Perempuan	19	45,24%
Jumlah	42	100%

Sumber: olahan peneliti

Hasil Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menguji data yang diperoleh dari hasil kuesioner. Untuk menentukan data tersebut valid atau tidak, maka pengujinya dilakukan dengan menggunakan *product moment (pearson)*. Dasar pengambilan keputusan pada uji validitas yaitu jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka dinyatakan valid, sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka dinyatakan tidak valid.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (X)	1	0,743	0,393	Valid
	2	0,892	0,393	Valid
	3	0,613	0,393	Valid
	4	0,456	0,393	Valid
	5	0,666	0,393	Valid
	6	0,523	0,393	Valid
	7	0,892	0,393	Valid
	8	0,743	0,393	Valid
Implementasi Good Governance (Y)	1	0,892	0,393	Valid
	2	0,480	0,393	Valid
	3	0,523	0,393	Valid
	4	0,666	0,393	Valid
	5	0,613	0,393	Valid
	6	0,456	0,393	Valid
	7	0,892	0,393	Valid
	8	0,416	0,393	Valid
	9	0,666	0,393	Valid
	10	0,480	0,393	Valid
	11	0,523	0,393	Valid
	12	0,743	0,393	Valid
	13	0,613	0,393	Valid
	14	0,456	0,393	Valid
	15	0,892	0,393	Valid

Sumber: olahan peneliti

Dari tabel 2 dapat dilihat, bahwa nilai r_{tabel} didapat dari distribusi tabel r dengan dengan alpha 0,01 dan $df = 40$ ($n-2$; $42-2$), sehingga $r_{tabel} = 0,393$. Sedangkan nilai r_{hitung} didapat dari masing-masing pernyataan. Kemudian nilai r_{hitung} besar dari r_{tabel} sehingga hal ini dapat dinyatakan bahwa kuesioner tersebut valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsisten responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan item-item pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Uji reabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu valid dilakukan dengan cara melihat *Cronbach Alpha*, nilai signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,60 maka bisa dikatakan reliabel. Dilihat dari tabel 3, nilai Cronbach Alpha yang dihasilkan sebesar $0,939 > 0,60$, maka hasil data pernyataan ini dapat dikatakan reliabel.

Tabel 3 Reliability Statistics

<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
,939	23

Sumber: output SPSS

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengansumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* jika hasil angka signifikansi (Sig) lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,125 untuk masing-masing variabel dan lebih besar dari 0,05, sehingga bisa dikatakan data berdistribusi normal.

Tabel 4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PSAK	IGG
N		42	42
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	32,3571	62,4762
	<i>Std. Deviation</i>	5,10295	8,15472
	<i>Most Extreme Differences</i>		
	<i>Absolute</i>	,122	,121
	<i>Positive</i>	,089	,089
	<i>Negative</i>	-,122	-,121
<i>Test Statistic</i>		,122	,121
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,125 ^c	,125 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: output SPSS

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Bentuk persamaan dari regresi dinyatakan dengan persamaan matematika, yaitu (Siregar 2013, 284): $Y = a + bX$.

Keterangan:

Y = Variabel terikat

X = Variabel bebas

a dan b = Konstanta

Tabel 5 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13,171	2,493		5,283	,000
PSAK	1,524	,076	,954	20,016	,000

a. Dependent Variable: IGG

Sumber: output SPSS

Dari tabel 5 maka dapat dijelaskan bahwa hubungan antara penerapan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dengan Implementasi *Good Governance* yaitu: $Y = 13,171 + 1,524X$, dimana nilai konstanta sebesar 13,171 yang menyatakan bahwa jika tidak ada penerapan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 maka nilai Implementasi *Good Governance* sebesar 13,171. Sedangkan koefisien regresi X sebesar 1,524 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai penerapan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, maka nilai Implementasi *Good Governance* sebesar 1,524. Kemudian dapat dilihat nilai signifikansinya menunjukkan angka sebesar 0,000, dimana $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara kedua variabel secara signifikan.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel dengan variabel lainnya. Uji hipotesis menggunakan *t-test* dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Dasar pengambilan keputusan untuk uji t adalah jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_a diterima, dengan kata lain variabel independen secara individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_a ditolak, artinya variabel independen secara individual tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis (H_a) dari penelitian ini adalah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 berpengaruh signifikan terhadap implementasi *Good Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat nilai $t_{hitung}=20.016$ dan nilai t_{tabel} didapat sebesar 1.683, maka $20.016 > 1.683$ sehingga bisa dikatakan H_a diterima yang berarti penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 berpengaruh signifikan terhadap implementasi *Good Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis.

Hasil Uji Koefisien Determinan

Koefisien determinan (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kontribusi berpengaruh variabel independen terhadap variabel terikat (Kuncoro 2001, 84). Jika R^2 semakin mendekati nol maka semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Sebaliknya jika R^2 semakin mendekati satu maka semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6 Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,954 ^a	,909	,907	2,48745

a. Predictors: (Constant), PSAK

b. Dependent Variable: IGG

Sumber: output SPSS

Dilihat dari tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai $R^2 = 0.909$. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 berpengaruh sebesar 90,9% terhadap implementasi *Good Governance*, sedangkan 9,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Karena nilai 0.909 cenderung mendekati angka 1 maka pengaruhnya sangat besar.

KESIMPULAN

BAZNAS Kabupaten Bengkalis sudah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 109, Sehingga laporan keuangan yang didapatkan tertulis dengan rapi, jelas mudah untuk dipahami khususnya pada staf keuangan di Baznas sendiri. Implementasi *Good Governance* dalam layanan di BAZNAS Kabupaten Bengkalis sudah terlaksana dengan baik dengan melihat partisipasi masyarakat, akuntabilitas yang menunjukkan jawaban yang positif seperti prosedur yang mudah, cepat memberi pelayanan, bertanggung jawab, adil dan transparan terhadap masyarakat terutama melalui media massa dan internet, sehingga BAZNAS Kabupaten Bengkalis dapat kepercayaan dari masyarakat. Kemudian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 berpengaruh positif terhadap Implementasi *Good Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dengan besar pengaruhnya 90,9%. Sedangkan sisanya 9,1% dapat dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfigari. 2000. *Analisis Regresi*. Yogyakarta: BPFE.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Perbedaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.

- Arikunto. 2010. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Salemba Empat.
- Azwar, Saifuddin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Finasialku. 2019. *Definisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK*. Diakses dari <https://www.finansialku.com/psak/>, tanggal 19 Februari 2019.
- Hakim, Lukman. 2019. "Pengaruh Return On Asset, Investment Opportunity Set Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan LQ45". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8 (1), 33-42.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial*. Jakarta: Gp Press.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Publishing.
- Khaddafi, Muammar, et. al. 2016. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Penerbit Madenatera.
- Kurniawan, Ova. 2012. *Project Assignment Report: Meningkatkan Implementasi Good Corporate Governance*. Jakarta: PT PLN Persero.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3ei Press.
- Neta, Yulia. 2012. "Model Tata Kelola Administrasi Pemerintah Yang Baik di Daerah Otonom Baru", *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2), 1-15. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.80>.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah Edisi I*. Jakarta: Kencana Prenadana Media Group.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Public Formulasi Imlementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurhayati, Sri and Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, Bujang. 2014. *Good Governance Di Sekolah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Taufikur. 2015. "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)". *MUQTASID: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6 (1), 141-164. <http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.
- Republik Indonesia, 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Rosidi, Abidar dan Rinatana Anggraeni Fajriani. 2013. *Reinventing Demokrasi Dan Revormasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Rozalinda. 2013. *Ekonomi Islam; Teori dan Aplkasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2011. *Membangun Dan Mengembangkan Kepemimpinan Serta Meningkatkan Kinerja Untuk Meraih Keberhasilan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sadarmayati. 2012. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) & Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Bagian Ketiga Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.

- Satori, Djam'an. 2011. *Perspektif Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Solihin, Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suaib, Muhammad Ridho Suaib. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Trisilo, Rudi Bambang. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.